



Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018

Voters Participation in The General Election of Head of Region of Regent/Vice Regent of Langkat Regency in 2018

Suhardi, Muhammad Arif Nasution & Heri Kusmanto*

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara, Medan

Diterima: 07 Februari 2019; Disetujui: 18 Oktober 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat dan masyarakat yang menjadi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak khususnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat. Informan utama adalah para Pemilih yakni Penduduk Kabupaten Langkat yang berusia minimal 17 tahun ke atas. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, yang mengemban masa Jabatan 2019-2024 adalah sebesar 66,48 % (atau berada pada kategori Sedang). Kecamatan Kuala (89,99 %) merupakan prosentasi tertinggi partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, sedangkan Kecamatan Pangkalan Susu adalah yang terendah yakni 55,25 %.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati

Abstract

This study describes the participation of voters in regional head elections. The form of research used is descriptive qualitative method. The researcher conducted research directly at the Langkat Regency General Election Commission and the people who became voters in the simultaneous Regional Head General Elections especially the Langkat Regent and Deputy Regent General Elections in 2018. The informants in this study were the Langkat Regency General Election Commissioner. The main informants were the Voters namely the Langkat Regency Population who were at least 17 years and above. Primary data collection, carried out by interview and observation. Secondary data collection is done by library research. The methods of data analysis in this study are as follows: Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Withdrawal of Research Results: The level of voter participation in the Election of Regional Heads (Case Study of Election of Regent and Deputy Regent of Langkat in 2018) which holds 2019- 2024 is 66.48% (or is in the Medium category). Kuala Subdistrict (89.99%) is the highest percentage of voter participation in polling stations in the Langkat District and Deputy Regent Election, while Pangkalan Susu District is the lowest at 55.25%.

Key Words: Voter Participation, General Election, Regent and Vice Regent.

How to Cite: Suhardi, Nasution, M.A. & Kusmanto, H. (2019). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 344-354.

*Corresponding author:

E-mail: herikusmanto@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara secara langsung oleh masyarakat yang memnuhi syarat peraturan perundang-undangan.

Partisipasi warga sebagai pemilih merupakan suatu keniscayaan yang diperlukan dalam mewarnai kehidupan demokrasi (Darmila, dkk., 2019; Kusmanto, 2013; Suharyanto, 2014; Susi,

2015). Pemilih merupakan pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah, yang berhak mengikuti Pemilihan Umum. Oleh karena itu, partisipasi politik khususnya pada pemilihan umum merupakan hal yang penting (Ivanna & Iqbal, 2018; Wardhani, 2018; Zega, dkk., 2018). Diperlukan adanya pemahaman dan pendidikan politik yang berkesinambungan untuk menciptakan generasi penerus yang peduli dan aktif dalam membangun kehidupan berdemokrasi yang sehat untuk menciptakan stabilitas politik yang mantap guna mendukung keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan.

Jika melihat evaluasi partisipasi pemilih dalam pemilihan Umum dari masa ke masa, maka didapatkan angka yang fluktuatif namun cenderung menurun (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia). Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu tahun 1955 (Era Orde Lama) mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Pada era Orde Baru dimulai Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi politik sampai

96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen.

Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi menurun terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres 2004 putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres 2004 putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen (<https://www.merdeka.com>).

Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih sedikit meningkat yakni mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3

persen. Pada pemilihan Legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih meningkat menjadi 75,11 dan 24,89 % golput, sedangkan pada Pilpres 2014 partisipasi pemilih menurun menjadi 70,1 dengan Golput 29,1 % (<https://www.merdeka.com>)

Pada gelaran Pilkada serentak pada tahun 2018 di 171 daerah sebesar 73,24 persen. Jumlah tersebut tidak mencapai target yang dipatok KPU yakni 77,5 persen. Pemilihan Umum Kepala daerah serentak pada tahun 2018 yang dilaksanakan pencoblosannya pada tanggal 27 Juni 2018, salah satunya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni No. urut 1 Terbit Rencana Perangin Angin, SE-Syah Afandin, SH., No urut 2 Rudy Hartono Bangun, SE, MAP-Budiono, SE dan No Urut 3 Drs. Sulistianto, M.Si-Heriansyah, S.Ag.

Latar belakang ketiga Calon tersebut beragam, Pasangan No Urut 1 yakni, Terbit Rencana PA, SE adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kab. Langkat yang juga adalah Ketua DPRD Kab. Langkat sedangkan wakilnya Syah Afandin, SH adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan No. Urut 2 adalah Rudi Hartonono Bangun, SE, MAP adalah politisi

Partai Demokrat dan duduk sebagai Anggota DPR/MPR RI sedangkan wakilnya Budiono pernah menjabat Wakil Bupati Langkat periode 2009-2014, dan pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Langkat tahun 2014 tetapi kalah oleh Ngogesa Sitepu, SH yang juga Bupati incumbent saat itu.

Pasangan No. urut 3 yakni Drs. Sulistianto, M.Si adalah Wakil Bupati Periode 2014-2019 yang sebelumnya adalah Birokrat Pemkab Langkat, sedangkan Pasangannya Heriansyah, S.Ag adalah seorang ustadz yang juga aktivis Islam yakni Ketua Persaudaraan Alumni 212 Kab. Langkat.

Pemilihan tersebut menghasilkan kemenangan bagi Pasangan No urut 1 yakni Terbit Rencana PA, SE dan Syah Afandin, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat masa bakti 2019-2024. Berdasarkan hal inilah, menarik perhatian untuk melakukan penelitian tentang "Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat tahun 2018)"

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat dan masyarakat yang menjadi pemilih pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak khususnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat. Informan utama adalah para Pemilih yakni Penduduk Kabupaten Langkat yang berusia minimal 17 tahun ke atas. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan data skunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada tingkat Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Langkat Langkat tahun 2018, rapat Pleno Terbuka KPU Langkat dilaksanakan di gedung Pegnasos Stabat. Setelah rapat pleno KPU Langkat dibuka Ketua KPU Langkat, selanjutnya masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 23 Kecamatan secara berurut memaparkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Pleno dipimpin Langsung Ketua KPU Langkat Agus Arifin dan didampingi anggota KPU Langkat Muhammad Khair, Sopian Sitepu, Muhammad Benyamin dan Adelina Sarah. Ketua KPU Langkat, Agus Arifin menyampaikan hasil rekapitulasi Pilkada Bupati Langkat dari 23 Kecamatan, perolehan suara terbanyak diraih paslon nomor urut 1, Terbit Rencana Perangin-angin-Syah Afandi, disusul paslon nomor urut 2 Rudi Hartono Bangun-Budiono, dan paslon nomor 3 Sulistianto-Heriansyah berada di urutan ketiga.

"Rekap dari 23 Kecamatan, pasangan Terbit Rencana Perangin-angin dan Syah Afandin total memperoleh 242.273 suara. Rudi-Budi meraih 162.947 suara. Sedangkan Sulistianto-Heriansyah meraih 54.854. Total suara sah 460.074, dan suara tidak sah 15.652," (wawancara dengan Komisioner KPUD Kab. Langkat, Januari 2019)

Dari 715.648 Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sekitar 475.726 orang (66,48 %) yang berpartisipasi atau dapat dikatakan tingkat partisipasi pada kategori sedang, dan 239.922 orang atau sekitar 33,52 % pemilih tidak menyalurkan hak suaranya.

Dapat diketahui bahwa Kecamatan Kuala (89,99 %) merupakan prosentasi tertinggi partisipasi pemilih di TPS pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, sedangkan Kecamatan Pangkalan Susu adalah yang terendah yakni 55,25 %.

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 13 kecamatan yang partisipasi pemilihnya berada di atas rata-rata Kabupaten yakni: Kecamatan Kuala (89,99 %), Kecamatan Salapian (77,10 %), Kecamatan Sirapit (76,18 %), Kecamatan Stabat (73,85 %), Kecamatan Binjai (72,89 %), Kecamatan Wampu (72,49 %), Kecamatan Bahorok (71,72 %), Kecamatan Selesai (71,38 %), Kecamatan Pematang Jaya (69,88 %), Kecamatan Sawit Seberang (68,53 %), Kecamatan Hinai (68,10 %), Kecamatan Batang Serangan (67,53 %), Kecamatan Kutambaru (67,27 %).

Adapun 10 Kecamatan lainnya partisipasinya dibawah rata-rata Kabupaten meskipun di atas 50 % yakni: Kecamatan Pangkalan Susu (55,52 %), Kecamatan Tanjung Pura (56,69 %), Kecamatan Gebang (58,68 %), Kecamatan Sei Lapan (59,43 %), Kecamatan Brandan Barat (59,81 %), Kecamatan Babalan (59,90 %), Kecamatan Besitang (63,36 %), Kecamatan Secanggang (63,56 %), Kecamatan Kecamatan Padang Tualang (64,14 %) dan Kecamatan Sei Bingai (66,15 %).

Jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya memang terjadi

peningkatan partisipasi pemilih pada perbandingan partisipasi pemilih, dapat Pemilu 2018 ini. Untuk melihat dilihat pada tabel. berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Prosentasi Partisipasi Pemilu di Kab. Langkat

No.	Pemilu	Prosentasi Pemilih	Prosentasi Tidak Memilih
1.	PILGUBSU 2008	60,82 %	39,18 %
2.	Pemilihan Bupati Langkat 2008 Putaran I	57,94 %	42,06 %
3.	Pemilihan Bupati Langkat 2008 Putaran II	58,09 %	41,91 %
4.	Pemilihan Bupati Langkat 2013	58,81 %	41,19 %
5.	Pemilu Serentak (Pilgubsu dan Pilbup Langkat) 2018	66,48	33,52 %

Sumber: KPU Kabupaten Langkat, 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Status Sosial dan Ekonomi

Pada umumnya partisipasi pemilih berdasarkan kesadaran sendiri berada pada kalangan masyarakat Kab. Langkat yang berpendidikan dan berlatar belakang PNS, Pegawai BUMN, Karyawan Swasta dan pengusaha sedangkan yang dimobilisasi ataupun dipengaruhi faktor lain umumnya adalah buruh tani, buruh pabrik, nelayan dan pekerja sektor informal.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Langkat, berdasarkan data kecamatan, maka kecamatan yang berada di **Langkat Hulu** yakni Kecamatan Kuala (89,99 %), Kecamatan Salapian (77, 10 %), Kecamatan Sirapit (76,18 %), Kecamatan Bahorok (71,72 %), Kecamatan Selesai (71,38 %), Kecamatan Kutambaru (67,27 %) dan **Langkat Hilir**: Kecamatan Stabat (73,85 %), Kecamatan Binjai (72,89 %), Kecamatan Wampu (72,49 %), Kecamatan Sawit Seberang (68,53 %), Kecamatan Hinai (68, 10 %), Kecamatan Batang

Serangan (67,53 %), dan Kawasan **Teluk Aru** : Kecamatan Pematang Jaya (69,88 %).

Pada umumnya mata pencaharian penduduknya adalah petani, pedagang dan karyawan., ketika ditanyakan alasan partisipasi dalam Pilkada Langkat ini, informan menjawab menyisihkan waktunya untuk memberikan hak suara sebelum bekerja di lading/sawah, sedangkan para Pegawai dan karyawan umumnya libur sesuai dengan agenda politik dimana pada Pemilu PNS dan karyawan libur. Menurut responden:

“Kami kan libur jadi adalah waktu sebentar untuk kami datang ke TPS, nyoblos juga 5 menit kan udah siap, gampang terus pulang, abis tu terserah mau jalan-jalan atau istirahat dirumah kumpul dengan keluarga” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019).

Adapun tingkat partisipasi rendah adalah yang berada di Kawasan **Teluk Aru** Kecamatan Pangkalan Susu (55,52 %), Kecamatan Sei Lapan (59,43 %),

Kecamatan Brandan Barat (59,81 %), Kecamatan Babalan (59,90 %), Kecamatan Besitang (63,36 %), dan dan sebagian **Langkat Hilir**: Kecamatan Secanggang (63,56 %), Kecamatan Kecamatan Padang Tualang (64, 14 %), Kecamatan Tanjung Pura (56,69 %) Kecamatan Gebang (58,68 %), dan 1 kec **Langkat Hulu** yakni Kecamatan Sei Bingai (66,15 %). Pada umumnya penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan buruh atau pekerja sektor informal. Pada umumnya mereka enggan meninggalkan pekerjaan dan sumber rezeki mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilukada, menurut seorang responden di Pangkalan Susu yang partisipasinya terendah:

“Kami malas bang datang ke TPS, karena sayangnya gak melaut gara-gara Pilkada kami gak dapat uang, memangnya kalo ikut nyoblos Pilkada apa hidup kami lebih baik? Kan belum tentu, kami pilih yang pasti-pasti ajalah bang, kerja dapat uang, periuk di dapur bisa ngebul, anak bisa sekolah” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019)

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Situasi

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang

lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

Dalam hal ini untuk Konteks Pilkada Langkat, cuaca pada saat pilkada cukup cerah dan tidak ada penghalang ke TPS. Sedangkan faktor keluarga atau faktor kekerabatan dianggap paling dominan, khususnya yang terjadi pada etnis karo, dimana ada terdapat 2 orang yang berlatar belakang etnis Karo, dan etnis Melayu (pada calon Wakil Bupati). Uniknyanya meskipun etnis Jawa adalah mayoritas, namun pasangan calon Bupati yang berlatar belakang etnis Jawa memperoleh suara paling rendah.

Adapula yang memilih karena orang lain yakni karena diajak oleh orang tua dan atau suami/istri. Sehingga mereka bersama-sama pergi ke TPS. Sedangkan bagi orang tua yang sakit dan tidak mampu berjalan ke TPS maka pihak KPPS mendatangi rumah pemilih tersebut agar dapat menyalurkan hak pilihnya, ini terjadi di Kec. Stabat yang memang jarak antara TPS dan rumah penduduk tidak jauh.

Sedangkan kelompok mempengaruhi sebagian pemilih untuk datang ke TPS karena menjadi bagian dari suatu wadah organisasi baik itu Organisasi kemasyarakatan, Kepemudaan, pengajian atau organisasi informal lainnya, dimana ada ikatan dengan calon Bupati/Wakil Bupati, sehingga membuat masyarakat

yang mempunyai ikatan kelompok tersebut mau berpartisipasi setidaknya untuk mendukung orang yang tergabung atau menjadi ketua dalam kelompoknya.

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Afiliasi Politik Orang Tua

Umumnya terjadi pada pemilih pemula yang berasal dari kalangan pelajar dan Mahasiswa, dimana ini adalah pengalaman pertama mereka terlibat dalam dunia politik, sehingga mereka memilih berdasarkan arahan orang tua (patron). Umumnya orang tua mengajak serta anak-anak mereka yang mempunyai hak suara pergi bersama-sama ke TPS. Dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak dan orang tua serta kerabat lainnya sering berdiskusi pula tentang politik khususnya Pilkada Kab. Langkat. Menurut informan yang masih berusia muda:

“ Sering kok ngobrol sama Bapak dirumah soal pemilihan Bupati ini la, dari Bapak la awak tau bagaimana dan siapa calon yang baik” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019)

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Pengalaman Berorganisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan

pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Simangunsong, 2004). Biasanya kalangan terpelajar dan masyarakat yang berlatar belakang pekerja formal lebih memiliki kesadaran untuk memilih, meskipun ada beberapa yang memilih berdasarkan kepentingan karirnya di pemerintahan dan ekonomi.

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Kesadaran Politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat diahidup (Hendrik, 2010). Umumnya kesadaran Politik dalam konteks Pilkada Langkat berasal dari Kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang memadai (SLTA dan Perguruan Tinggi) serta yang mendapatkan informasi politik dari media elektronik dan cetak.

Untuk daerah yang tingkat partisipasinya tinggi umumnya 60 % penduduknya berlatar belakang SLTA ke atas. Sedangkan daerah yang tingkat partisipasinya rendah seperti di Pangkalan Susu dan kawasan pesisir Kab. Langkat umumnya pendidikan masyarakatnya SD

dan SLTP (sumber BPS Kab. Langkat). Sehingga berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi dengan kesadaran politik. Meskipun demikian, ada pula sejumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi (SLTA dan Sarjana) tetapi tetap golput dengan alasan tidak ada figur calon yang sesuai dengan ekspektasinya.

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).

Masyarakat Langkat sebagian memiliki keyakinan dengan memilih Calon tertentu akan membuat Pemerintahan Kabupaten Langkat lebih baik dan kesejahteraan rakyat meningkat, sehingga mereka berpartisipasi dalam pemilihan dan memberikan hak suaranya. Keyakinan itu justru menambah semangat mereka untuk datang ke TPS. Menurut seorang informan:

“Kalo mau Langkat ini lebih baik, ya milih dong, bagaimana mau merubah keadaan dengan tidak berbuat apa-apa.” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019)

Sementara ada pula yang tidak yakin dengan pemerintah, karena menurut beberapa responden memilih ke TPS tidak membawa perubahan, ada juga yang pesimis pemilukada adalah suara rakyat murni, menurut salah seorang informan:

“Sama aja bang, mau milih atau gak milih nasib kami kan gini-gini aja, udah taunya kita siapa yang menang nanti, ngapain capek-capek kita ikut-ikutan” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019)

Partisipasi Pemilih Berdasarkan Stimulan Partisipasi Melalui Sosialisasi Media Massa dan Diskusi-Diskusi Informal

Peran media dalam mensosialisasikan pemilu juga dianggap merupakan faktor penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu pemilu. Dengan terinformasikannya pemilu secara luas terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan serta cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan pemilu, maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemilu yang akan berdampak terhadap partisipasi itu sendiri. Tidak kalah penting dari sosialisasidi media, diskusi-diskusi tentang pemilu yang dilakukan secara ringan dan informalpun dianggap punya andil dalam mengakumulasi pengetahuan masyarakat tentang pemilu, yang semua itu pada gilirannya akan diharapkan

berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu. Umumnya Masyarakat Langkat yang memiliki pengetahuan dari beberapa acara Talkshow Politik seperti Indonesia Lawyers Club dan isu-isu politik lokal lainnya sering berdiskusi di Warung Kopi, tempat kerja atau ngobrol santai bersama rekan dan sanak saudara, meskipun terkadang afiliasi politik berbeda-beda tergantung kepentingan masing-masing, menurut seorang informan:

“Sering kami ngobrol politik itu di warung kopi biasanya membahas masalah Pilkada dan isu-isu terkini dari siaran TV, Koran ataupun internet, Kalo udah membahas itu seru kali bang, aku pun jadi semangat untuk memilih di TPS ” (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2019)

SIMPULAN

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018) yang mengemban masa Jabatan 2019-2024 adalah sebesar 66,48 % (atau berada pada kategori Sedang). Kecamatan Kuala (89,99 %) merupakan prosentasi tertinggi partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, sedangkan Kecamatan Pangkalan Susu adalah yang terendah yakni 55,25 %..

Berdasarkan penelusuran terdapat 13 kecamatan yang partisipasi pemilihnya berada di atas rata-rata Kabupaten yakni: Kecamatan Kuala (89,99 %), Kecamatan Salapian (77, 10 %), Kecamatan Sirapit (76,18 %), Kecamatan Stabat (73,85 %), Kecamatan Binjai (72,89 %), Kecamatan Wampu (72,49 %), Kecamatan Bahorok (71,72 %), Kecamatan Selesai (71,38 %), Kecamatan Pematang Jaya (69,88 %), Kecamatan Sawit Seberang (68,53 %), Kecamatan Hinai (68, 10 %), Kecamatan Batang Serangan (67,53 %), Kecamatan Kutambaru (67,27 %). Adapun 10 Kecamatan lainnya partisipasinya di bawah rata-rata Kabupaten meskipun di atas 50 % yakni: Kecamatan Pangkalan Susu (55,52 %), Kecamatan Tanjung Pura (56,69 %) Kecamatan Gebang (58,68 %), Kecamatan Sei Lengan (59,43 %), Kecamatan Brandan Barat (59,81 %), Kecamatan Babalan (59,90 %), Kecamatan Besitang (63,36 %), Kecamatan Secanggang (63,56 %), Kecamatan Kecamatan Padang Tualang (64, 14 %) dan Kecamatan Sei Bingai (66,15 %).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat tahun 2018) adalah: Status sosial dan ekonomi, Situasi, Afiliasi politik orang tua, Pengalaman berorganisasi, Kesadaran

politik, Kepercayaan terhadap pemerintah, Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi Informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakti, A.F. (ed.). (2012). *Literasi politik dan konsolidasi demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Budiardjo, M. (2002). *Partisipasi dan partai politik*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmila, L. Ivanna, J. & Iqbal, M. (2019) Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 58-71.
- Efriza. (2012). *Political explore sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Gaffar, J.M. (2012). *Politik hukum pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya.
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi
- Huntington, S.P & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hussein, B. (2015), *Desentralisasi dan otonomi daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ivanna, J. Pardede, A.J. & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 25-35.
- Kaelola, A. (2009). *Kamus istilah politik politik kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala
- Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.
- Marbun, B.N. (2013). *Kamus politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maskun, (2010), *Filsafat hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar, M. & Andrew, C.M. (2008). *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moeloeng, L.J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nielsen, H, (1991). *The chilean process of transition*, Aarhus: University of Aarhus, Institute of Political Science
- Pasolong, H. (2012). *Metode penelitian administrasi public*. Bandung: Alfabeta.
- Rafael, R.M. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, H.A. (2007). *Sistem politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rush, M. & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrada Persada.
- Sarundajang. (2012). *Pilkada langsung problematika dan prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Schumpeter, J. (1947). *Capitalism, socialism, and democracy*, New York: Harper.
- Simangunsong, B. (2004). *Negara. Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta: Gramedia
- Sitepu, P.A. (2012). *Teori-teori politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Smith, B.C. (2007), *Good governance*, New York: Palgrave, MacMillan
- Soebagio, (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia, *Jurnal Makara*, Vol. 12 No. 2, Desember
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 166-175
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Susi S dan Adelita L., (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 1-3.
- Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1): 57-62.
- Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, *PERSPEKTIF*, 7(2): 60-65.